

**Progres Pengelolaan Informasi dan Masalah (PIM)
Program KOTAKU (NSUP)
(Kota Tanpa Kumuh)
Periode Februari 2018
Wilayah 2
(OSP 5, OSP 6, OSP 7, OSP 8, OSP 9)**

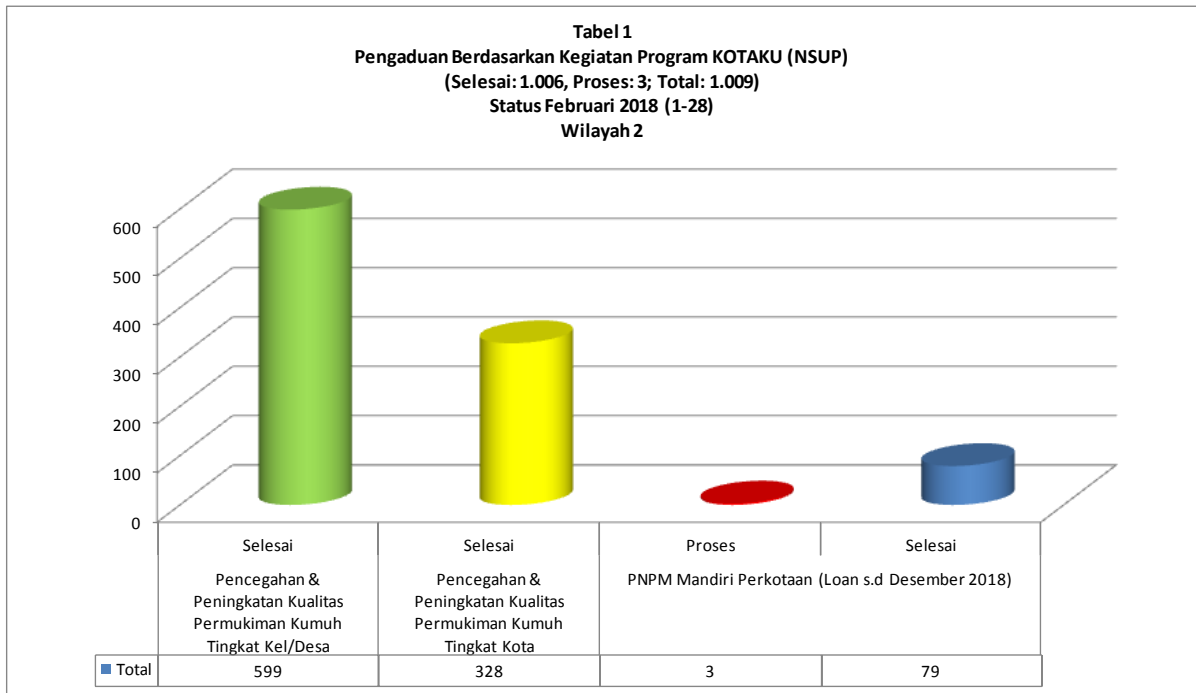
Pendahuluan

Progres ini merupakan rekapitulasi dokumen hasil pengelolaan informasi dan masalah (PIM) di Program KOTAKU (Program Kota Tanpa Kumuh) wilayah - 2. Adapun dalam mengelola data hasil PIM ini menggunakan manual Ms. Excel, karena aplikasi SIM PIM direncanakan ke depan berbasis on-line dan segera diluncurkan.

Pada bulan Februari 2018, total pengaduan yang telah dikelola di seluruh program KOTAKU (Program Kota Tanpa Kumuh) wilayah - 2 (dua) berjumlah 1.009 pengaduan (selesai 1.006 (99,7%), proses 3 (0,3%) pengaduan). Data bulan ini bila dibandingkan dengan data bulan lalu terjadi kenaikan data sebanyak 81 pengaduan (data bulan lalu sebanyak 928 pengaduan). Kenaikan data ini disebabkan antara lain karena ada peningkatan jumlah data pengaduan yang dikirim oleh OSP Provinsi.

Progres pengaduan di bulan Februari 2018 antara lain (lihat tabel 1) adalah berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan program KOTAKU pencegahan dan peningkatan kumuh tingkat kota yang didominasi oleh Provinsi Sulawesi Utara (274 pengaduan) dan Provinsi Jawa Tengah (136 pengaduan) dan Sulawesi Tenggara (116 pengaduan). Selengkapnya dapat dilihat di tabel 1a.

Untuk pengaduan dalam pelaksanaan kegiatan program KOTAKU pencegahan dan peningkatan kumuh tingkat Kelurahan/Desa yang paling banyak diadakan adalah mengenai Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Skala Lingkungan/PLPBK Lanjutan (120 pengaduan atau 20%) sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan pencegahan dan peningkatan kumuh tingkat Kabupaten/Kota yang paling banyak diadakan adalah mengenai pelaksanaan sosialisasi awal (Kel/Desa, Kab/Kota, dan Provinsi) (99 pengaduan atau 30,18%), dan untuk

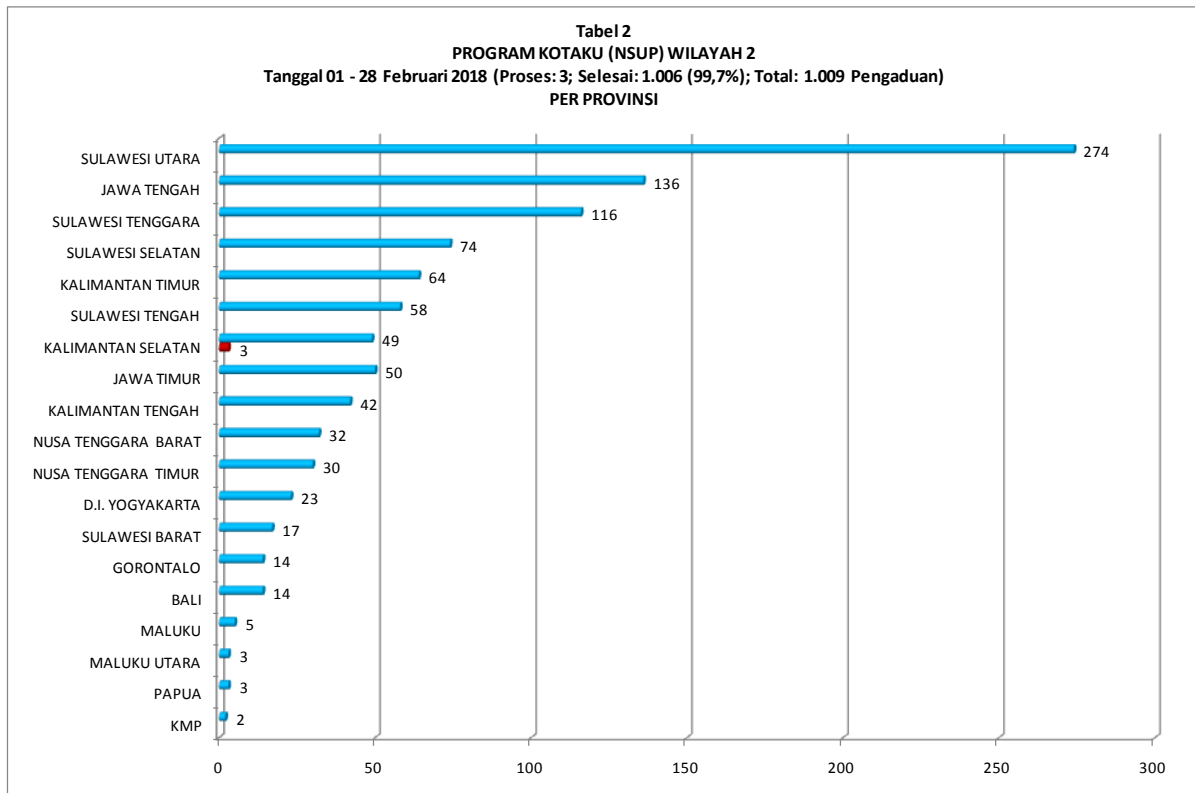


lokasi bekas dampingan PNPM Mandiri Perkotaan yang banyak diadakan adalah pelaksanaan kegiatan pemilu BKM (PNPM Mandiri Perkotaan) (30 pengaduan atau 36,5%).

Tabel 1a

JENIS KEGIATAN/PROVINSI/STATUS/PROGRAM KOTAKU (NSUP) WILAYAH 2	B	D	G	J	J	K	K	K	M	N	N	S	S	S	S	S	G	G	Grand	
	A	I	O	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	Total	
☑Pencegahan & Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Tingkat Kel/Desa	10	17	8	88	31	28	27	37	4	2	18	21	2	11	51	27	91	126	599	
Selesai	10	17	8	88	31	28	27	37	4	2	18	21	2	11	51	27	91	126	599	
☑Pencegahan & Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Tingkat Kota	3	1	4	45	5	19	2	17		1	12	8		4	22	31	21	131	2	328
Selesai	3	1	4	45	5	19	2	17		1	12	8		4	22	31	21	131	2	328
☑PNPM Mandiri Perkotaan (Loan s.d Desember 2018)	1	5	2	3	14	5	13	10	1		2	1	1	2	1		4	17		82
Proses							3													3
Selesai	1	5	2	3	14	2	13	10	1		2	1	1	2	1		4	17		79
Grand Total	14	23	14	136	50	52	42	64	5	3	32	30	3	17	74	58	116	274	2	1009

Dari tanggal 01 s/d 28 Februari 2018. Pengaduan yang terjadi dari tanggal 01 Februari 2018 sampai dengan 28 Februari 2018 sebanyak 1.009 pengaduan (selesai 1.006 (99,7%), proses 3 (0,3%) pengaduan).



Pada tabel 2 terlihat bahwa belum seluruh Provinsi ada pengaduannya yang terjadi dari tanggal 01 sampai 31 Februari 2018. Adapun Provinsi tersebut adalah Papua Barat.

A. Progres PIM di program KOTAKU (Program Kota Tanpa Kumuh) Wilayah - 2

Periode Februari 2018

1. Gambaran Umum

Progres ini merupakan rekapitulasi dokumen hasil PIM di Program KOTAKU (Program Kota Tanpa Kumuh) wilayah - 2 yang terjadi pada tanggal 01 Februari sampai dengan 28 Februari 2018, total pengaduan yang telah dikelola berjumlah 1.009 pengaduan. Dari total pengaduan tersebut status selesai sejumlah 1.006 (99,7%) pengaduan dan status proses sejumlah 3 (0,3%) pengaduan, berupa; pengaduan informatif sejumlah 990 (98,1%) [selesai 990 (100%), proses 0 (0%)] pengaduan. Sedangkan pengaduan masalah sejumlah 19 (1,9%)

[selesai 16 (84,2%), proses 3 (15,8%)] pengaduan. Adapun selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3 jumlah pengaduan berdasarkan sifat pengaduan.

Tabel 3

Tabel Jumlah Pengaduan Berdasarkan Sifat Pengaduan (Informatif & Masalah) PROGRAM KOTAKU (NSUP) Wilayah 2 01 Februari 2018 - 28 Februari 2018				
INFORMATIF				
NO.	KATEGORI	SELESAI	PROSES	TOTAL
1	Kritik	39	-	39
2	Saran	50	-	50
3	Pertanyaan	901	-	901
Sub Total		990	-	990
MASALAH				
NO.	KATEGORI	SELESAI	PROSES	TOTAL
1	Mekanisme & Prosedur	10	-	10
2	Penyimpangan Dana	-	3	3
3	Intervensi Negatif	2	-	2
4	Perubahan Kebijakan	4	-	4
5	Kode Etik	-	-	-
6	Force Majeur	-	-	-
Sub Total		16	3	19
TOTAL		1.006	3	1.009
Persentase		99,7%	0,3%	

Sumber: Data SIM PPM 28 Februari 2018

Perbandingan jumlah Kelurahan/Desa dengan jumlah pengaduan per Provinsi yang di input mulai 01 Februari – 28 Februari 2018 (tanggal kejadian) berdasarkan Provinsi dengan jumlah kelurahan terbanyak, yaitu Provinsi Jawa Tengah (1983 Kelurahan) memperoleh 6,9% dan Provinsi dengan jumlah kelurahan sedikit, yaitu Provinsi Sulawesi Barat (17 Kelurahan) memperoleh 100%. (Lihat tabel 4)

Adapun rata-rata pengaduan PROGRAM KOTAKU (Program Kota Tanpa Kumuh) Wilayah - 2 periode 01 – 28 Februari 2018 sebesar 16%.

Sedangkan provinsi yang persentase pengaduan di bawah 10% berdasarkan tabel 4 adalah Jawa Tengah (6,9%), Jawa Timur (3%), Maluku (6%), dan Maluku Utara (2%), Papua (8%) dan Papua Barat (0%).

Secara keseluruhan selama periode 01 – 28 Februari 2018 jumlah pengaduan yang masuk ada 1.007 pengaduan dengan tingkat penyelesaian 99,7%, belum termasuk data KMP sejumlah 2 pengaduan.

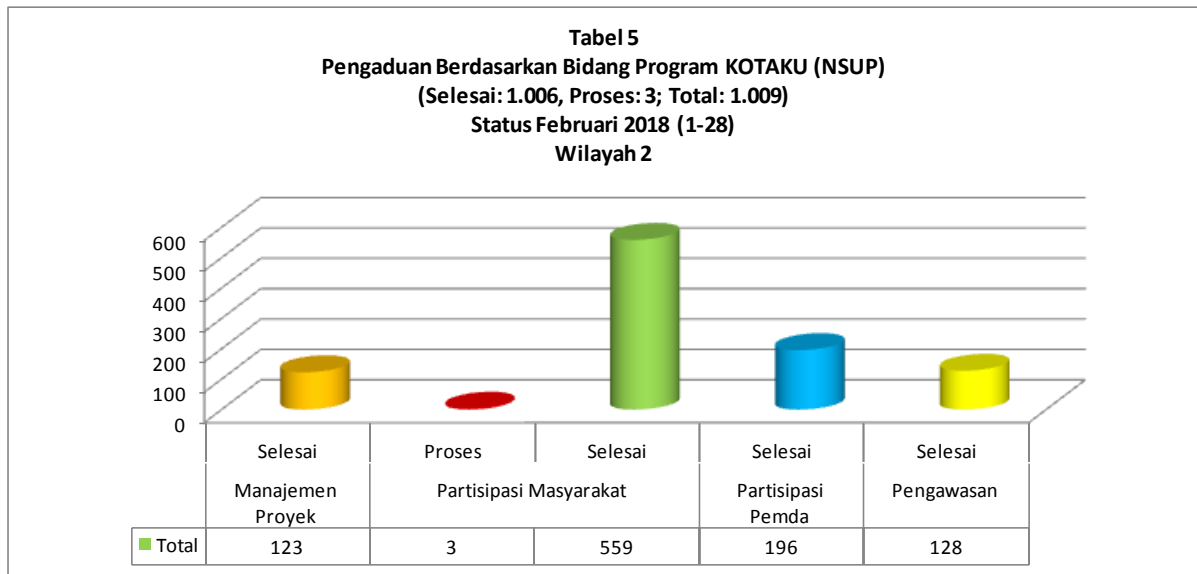
Tabel 4
Perbandingan Jumlah Kelurahan Dengan Jumlah Pengaduan
Periode 01 - 28 Februari 2018 Program KOTAKU (NSUP) Wilayah 2

Provinsi	Jml Kel	Jml	Jml %	Selesai	Jml %	Proses	Jml %
Jawa Tengah	1.983	136	6,9	136	100,0	-	-
DI Yogyakarta	178	23	13	23	100,0	-	-
Jawa Timur	1.857	50	3	50	100,0	-	-
Bali	130	14	11	14	100,0	-	-
Nusa Tenggara Barat	219	32	15	32	100,0	-	-
Nusa Tenggara Timur	130	30	23	30	100,0	-	-
Kalimantan Tengah	41	42	102	42	100,0	-	-
Kalimantan Selatan	239	52	22	49	94,2	3	-
Kalimantan Timur	145	64	44	64	100,0	-	-
Sulawesi Utara	307	274	89	274	100,0	-	-
Sulawesi Tengah	58	58	100	58	100,0	-	-
Sulawesi Selatan	321	74	23	74	100,0	-	-
Sulawesi Tenggara	129	116	90	116	100,0	-	-
Gorontalo	73	14	19	14	100,0	-	-
Sulawesi Barat	17	17	100	17	100,0	-	-
Maluku	84	5	6	5	100,0	-	-
Maluku Utara	152	3	2	3	100,0	-	-
Papua Barat	41	-	-	-	-	-	-
Papua	39	3	8	3	100,0	-	-
Total	6.143	1.007	16	1.004	99,7	3	0,3

2. Pengaduan Berdasarkan Bidang Pengaduan

Berdasarkan bidang pengaduan dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu: (1) pengawasan, (2) manajemen proyek, (3) partisipasi Pemda, dan (4) partisipasi masyarakat. Bidang pengaduan tersebut tercakup dalam lingkup administrasi teknis dan keuangan. Adapun lingkup administrasi teknis mencakup seluruh pengaduan yang berkaitan dengan proses pelaksanaan kegiatan program KOTAKU (Program Kota Tanpa Kumuh). termasuk administrasi penyaluran BDI (bantuan dana investasi). Sedangkan lingkup keuangan mencakup seluruh pengaduan yang berkaitan dengan pembayaran dan pemanfaatan kegiatan program KOTAKU (Program Kota Tanpa Kumuh) di wilayah masing-masing.

Pada tabel 5 untuk pengaduan dalam kategori bidang manajemen proyek sebanyak 123 pengaduan (selesai 123 (100%), proses 0 (0%) pengaduan); bidang partisipasi masyarakat sebanyak 562 pengaduan (selesai 559 (99,5%), proses 3 (0,5%) pengaduan); bidang partisipasi Pemda sebanyak 196 pengaduan (selesai 196 (100%), proses 0 (0%) pengaduan); dan bidang pengawasan sebanyak 128 pengaduan (selesai 128 (100%), proses 0 (0%) pengaduan).



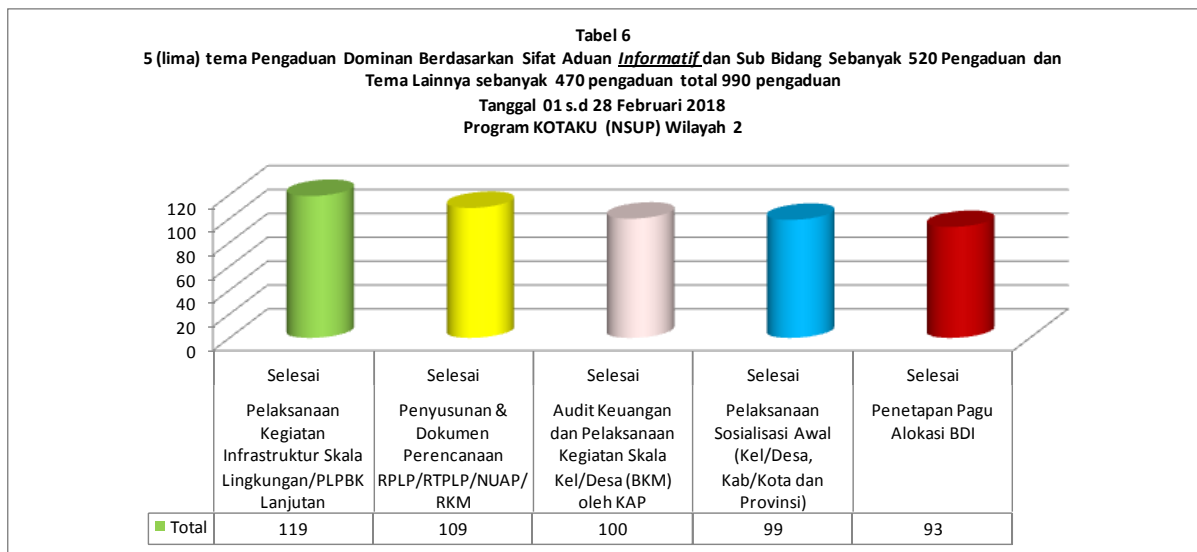
Selengkapnya lihat tabel 5a per provinsi.

Tabel 5a	B A L I	D . I . Y O G Y A K A R T A	G O R O N T A L O	J A W A T E N G A H	J A W A T I M U R	K A L I M A N T A N S E L A T A N	K A L I M A N T A N T E N G A H	K A L I M A N T A N T I M U R	K M P	M A L U K U	M A L U K U T A R A	N U S A T E N G G A R A B A R A T	N U S A T E N G G A R A T I M U R	P A P U A	S U L A W E S I B A R A T	S U L A W E S I S E L A T A N	S U L A W E S I T E N G A H	S U L A W E S I T E N G G A R A	S U L A W E S I U T A R A	G r a n d T o t a l	
																					B I D A N G / P R O V I N S I / S T A T U S / P R O G R A M K O T A K U (N S U P) W I L A Y A H 2
Manajemen Proyek		1	11	3	20	2	5	1		1	9	5	1	14	6	16	28	123			
Selesai		1	11	3	20	2	5	1		1	9	5	1	14	6	16	28	123			
Partisipasi Masyarakat	10	16	9	61	32	30	39	45		5	2	19	19	3	13	49	26	91	93	562	
Proses						3														3	
Selesai	10	16	9	61	32	27	39	45		5	2	19	19	3	13	49	26	91	93	559	
Partisipasi Pemda	3		3	16	2	1	1	13	1			4	5		3	9	26	5	104	196	
Selesai	3		3	16	2	1	1	13	1			4	5		3	9	26	5	104	196	
Pengawasan	1	6	2	48	13	1		1					1			2			4	49	128
Selesai	1	6	2	48	13	1		1					1			2			4	49	128
Grand Total	14	23	14	136	50	52	42	64	2	5	3	32	30	3	17	74	58	116	274	1009	

3. Pengaduan berdasarkan Sifat Pengaduan

Berdasarkan sifat pengaduan, maka pengelolaan pengaduan masyarakat pada program KOTAKU (Program Kota Tanpa Kumuh) ada dua (2), yaitu Informatif dan Masalah. Yang dimaksud dengan pengaduan informatif adalah pengaduan yang berupa kritik, saran serta pertanyaan. Jadi ketiga unsur pengaduan informatif tersebut **harus** dimasukan dalam format manual PIM berbasis Ms. Excel. Demikian juga dengan pengaduan yang bersifat masalah adalah pengaduan yang yang terkait dengan unsur mekanisme & prosedur, penyimpangan dana, intervensi negatif, perubahan kebijakan, kode etik, dan force majeure.

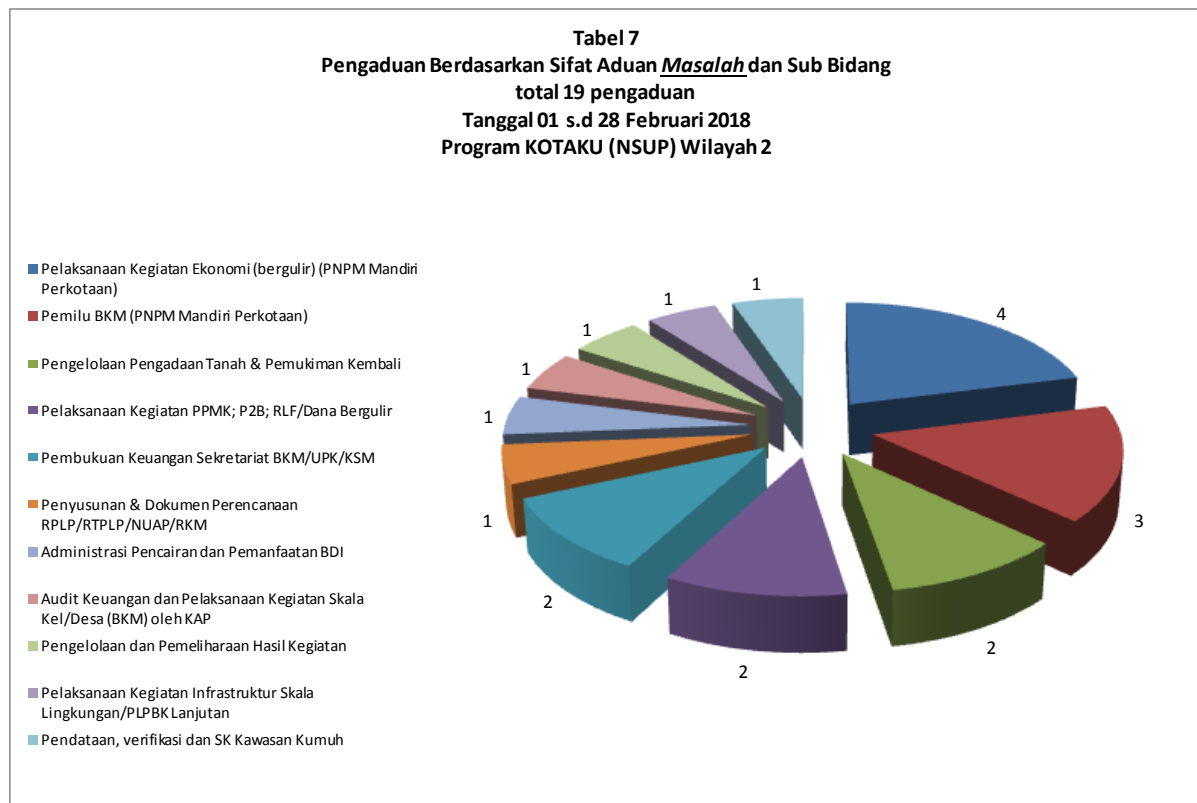
Berdasarkan data pada bulan Februari 2018 untuk kategori yang bersifat pengaduan informatif dengan 5 (lima) tema pengaduan dominan sebanyak 520 pengaduan dan tema lainnya sebanyak 470 pengaduan (total 990 pengaduan). Lihat tabel 6.



Selengkapnya lihat tabel 6a per provinsi.

Tabel 6a		INFORMATIF/SUB BIDANG/PROVINSI/PROGRAM KOTAKU (NSUP) WILAYAH 2																		
	BALI	DIYOGYAKARTA	GORONTALO	JAWABENGGAH	JAWATIMUR	KALIMANTANSELATAN	KALIMANTANTENGAH	KALIMANTANTIMUR	MALUKU	MALUKUTARA	NUSATENGGARA	NUSATENGGARABARAT	PAPUA	SULAWESI	SULAWESISELATAN	SULAWESITENGAH	SULAWESITENGGARA	SULAWESITUTARA	KMP	Grand Total
Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Skala Lingkungan/PLPBK Lanjutan	1	9	2	2	1	15	18	9	1	2	9		1	3	17	7	9	13		119
Penyusunan & Dokumen Perencanaan RPLP/RTPLP/NUAP/RKM				17	2	1					4	4			22	4	45	10		109
Audit Keuangan dan Pelaksanaan Kegiatan Skala Kel/Desa (BKM) oleh KAP	1	5	1	27	13	1		1			1				2		4	44		100
Pelaksanaan Sosialisasi Awal (Kel/Desa, Kab/Kota dan Provinsi)				3	1	1		5		1								2	87	99
Penetapan Pagu Alokasi BDI		1		11	3	11	1	2		1	7	3		1	12	4	16	19	1	93
Grand Total	2	15	3	60	19	29	19	17	1	3	21	8	1	4	53	15	76	173	1	520

Pada kategori yang bersifat masalah pada bulan Februari 2018 pengaduan sebanyak 19 pengaduan (selesai 16 (84%), proses 3 (16%) pengaduan). Lihat tabel 7.



Selengkapnya lihat tabel 7a per provinsi.

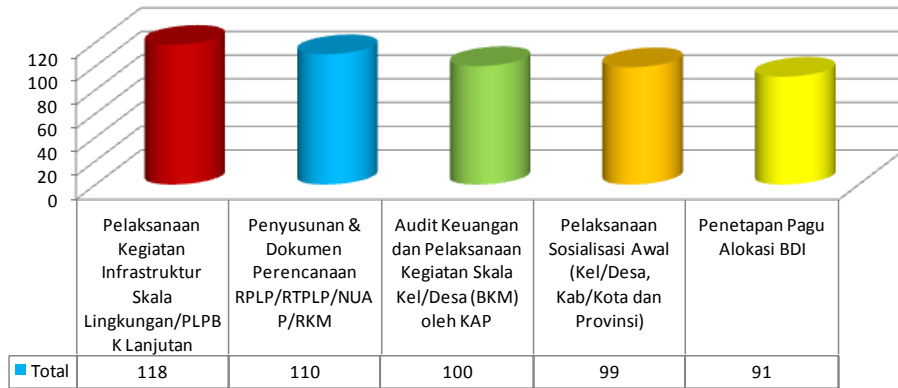
Tabel 7a						
MASALAH/SUB BIDANG/PROVINSI/PROGRAM KOTAKU (NSUP) WILAYAH 2		JAWA TENGAH	KALI MANTAN SELATAN	KALI MANTAN TIMUR	NUSSA TENGGARA TIMUR	Grand Total
Pelaksanaan Kegiatan Ekonomi (bergulir) (PNPM Mandiri Perkotaan)			3	1		4
Pemilu BKM (PNPM Mandiri Perkotaan)				3		3
Pengelolaan Pengadaan Tanah & Pemukiman Kembali					1	1
Pelaksanaan Kegiatan PPMK; P2B; RLF/Dana Bergulir				2		2
Pembukuan Keuangan Sekretariat BKM/UPK/KSM				2		2
Penyusunan & Dokumen Perencanaan RPLP/RTPLP/NUAP/RKM					1	1
Administrasi Pencairan dan Pemanfaatan BDI				1		1
Audit Keuangan dan Pelaksanaan Kegiatan Skala Kel/Desa (BKM) oleh KAP	1					1
Pengelolaan dan Pemeliharaan Hasil Kegiatan				1		1
Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Skala Lingkungan/PLPBK Lanjutan				1		1
Pendataan, verifikasi dan SK Kawasan Kumuh				1		1
Grand Total		1	3	12	2	1
						19

4. Pengaduan berdasarkan Asal/Sumber Masuk

Yang dimaksud dengan pengaduan berdasarkan sumber masuk adalah lokasi dimana pengaduan tersebut berasal. Lokasi/keberadaan sumber masuk pengaduan terdiri dari 5 (lima) sumber, yaitu: di Kelurahan, Kecamatan, Kab/Kota, Provinsi, dan Pusat.

Pengaduan berdasarkan sumber masuk adalah lokasi dimana pengaduan tersebut berasal, klasifikasi pengaduan berdasarkan asal/sumber masuk di Kelurahan pada bulan Februari 2018 dengan 5 (lima) pengaduan dominan ada 518 pengaduan dan tema lainnya ada 484 pengaduan (total selesai 1.002 pengaduan).

Tabel 8
5 (lima) Pengaduan Dominan Klasifikasi Pengaduan Berdasarkan Asal/Sumber Masuk di Kelurahan dan Sub Bidang Sebanyak 518 Pengaduan dan Tema Lainnya Sebanyak 484 Pengaduan, total: 1.002 pengaduan
Tanggal 01 s.d 28 Februari 2018



Selengkapnya lihat tabel 8a per provinsi.

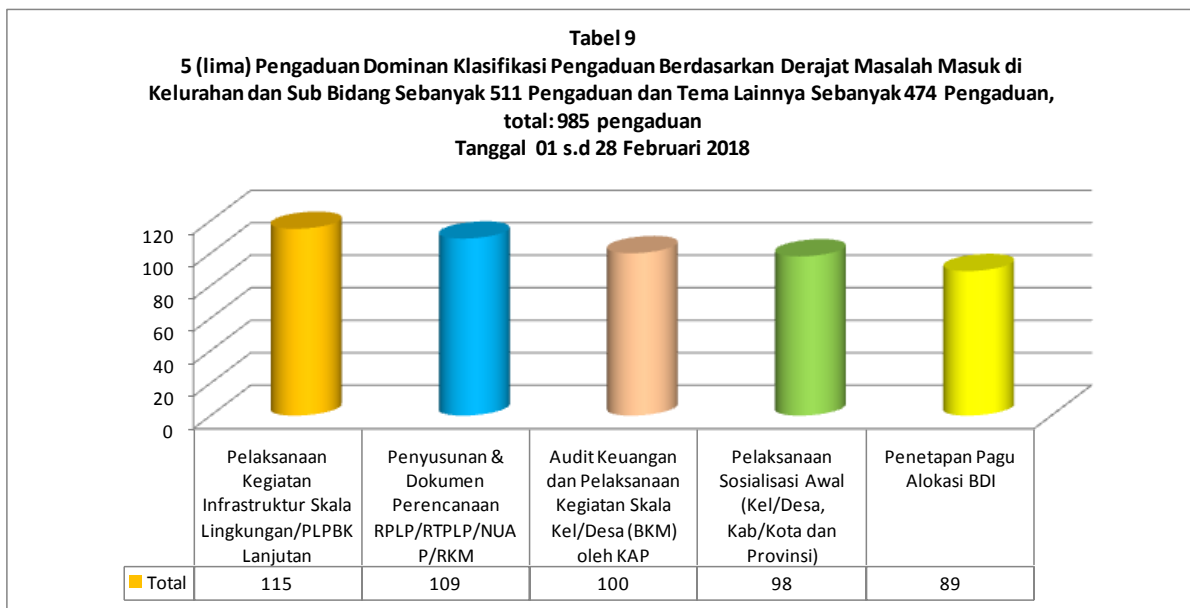
SUMBER ADUAN/SUB BIDANG/PROVINSI/PROGRAM KOTAKU (NSUP) WILAYAH 2	Tabel 8a																	Grand Total		
	BALI	D I Y O G Y A K A R T A	G O R O N T A L O	J A W A T E N G G A H	J A W A T I M U R	K A L I M A N T A N S E L A T A N	K A L I M A N T A N T E N G G A H	K A L I M A N T A N T I M U R	M A L U K K U	M A L U K K U T A R A	N U S A T E N G G A R A B A R A T	N U S A T E N G G A R A T I M U R	P A P U A	S U L A W E S I B A R A T	S U L A W E S I S E L A T A N	S U L A W E S I T E N G G A H	S U L A W E S I T E N G G A R A			
Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Skala Lingkungan/PLPB Lanjutan	1	9	2	2	1	15	18	8	1	2	9	1	3	17	7	9	13	118		
Penyusunan & Dokumen Perencanaan RPLP/RTPLP/NUAP/RKM				17	2	1					4	5			22	4	45	10	110	
Audit Keuangan dan Pelaksanaan Kegiatan Skala Kel/Desa (BKM) oleh KAP	1	5	1	28	12	1	1				1				2		4	44	100	
Pelaksanaan Sosialisasi Awal (Kel/Desa, Kab/Kota dan Provinsi)				3	1						1							2	87	99
Penetapan Pagu Alokasi BDI		1		11	2	11	1	2		1	7	3		1	12	4	16	19	91	
Grand Total	2	15	3	61	17	29	19	16	1	3	21	9	1	4	53	15	76	173	518	

5. Pengaduan berdasarkan Derajat Masalah

Derajat masalah menggambarkan tingkat/jenjang di mana pengaduan seharusnya dapat dikelola untuk mendapatkan solusi/penyelesaian yang menguntungkan semua pihak. Derajat masalah juga menggambarkan tingkat otoritas atau kewenangan dalam memfasilitasi pengaduan. Walaupun begitu jenjang dibawahnya tetap dilibatkan dalam memfasilitasi pengaduan. Berdasarkan klasifikasi tersebut, maka pengaduan terbagi dalam lima tingkatan, yaitu : Derajat 1: tingkat Kelurahan/Desa. Derajat 2: tingkat Kecamatan.

Derajat 3: tingkat Kabupaten/Kota. Derajat 4: tingkat KMW/Propinsi dan Derajat 5: Tingkat Pusat.

Pada bulan Februari 2018 penanganan pengaduan terbanyak pada tingkat kelurahan dengan 5 (lima) pengaduan dominan sejumlah 511 pengaduan dan tema lainnya sejumlah 474 pengaduan (total 985 pengaduan).



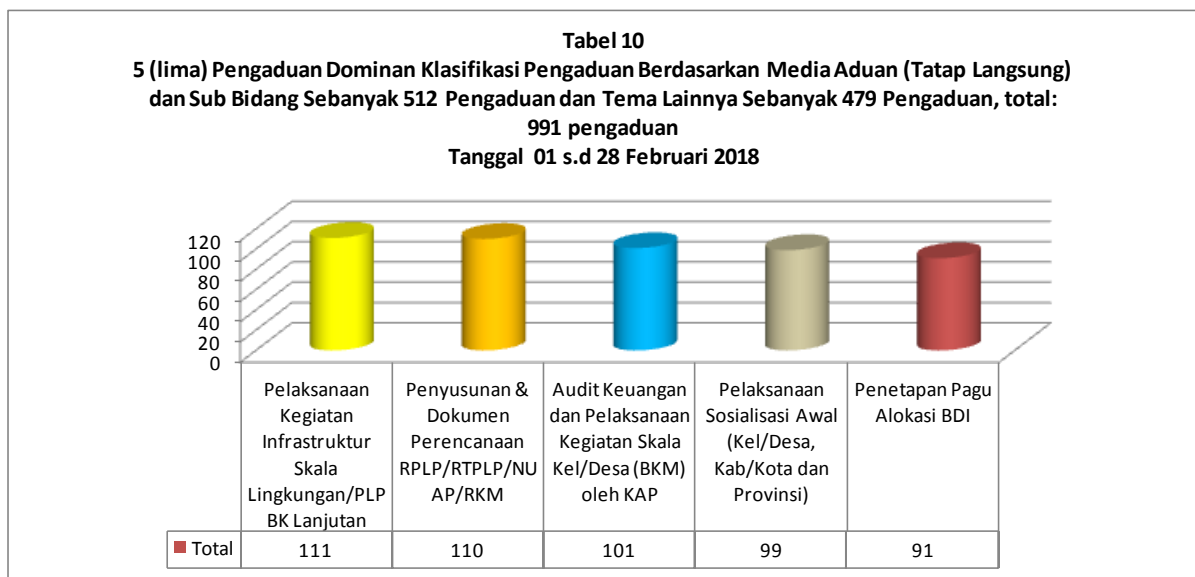
Tabel 9a di bawah berdasarkan per provinsi.

DERAJAT/SUB BIDANG/PROVINSI/PROGRAM KOTAKU (NSUP) WILAYAH 2	Grand Total																		
	BALI	D I Y O G Y A K A R T A	G O R O N T A L O	J A W A T E N G A H	J A W A T I M U R	K A L I M A N T A N	K A L I M A N T A N T E N G A H	K A L I M A N T A N T I M U R	M A L U K K U	M A L U K K U T A R A	N U S A T E N G G A R A	N U S A T E N G G A R A B A R A T	N U S A P A P U A	S U L A W E S I B A R A T	S U L A W E S I S E L A T A N	S U L A W E S I T E N G A H	S U L A W E S I T E N G G A R A	S U L A W E S I U T A R A	G r a n d T o t a l
Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Skala Lingkungan/PLPBK Lanjutan	1	9	2	2	1	15	16	7	1	2	9	1	3	17	7	9	13	115	
Penyusunan & Dokumen Perencanaan RPLP/RTPLP/NUAP/RKM				17	2	1					4	5			22	4	45	9	109
Audit Keuangan dan Pelaksanaan Kegiatan Skala Kel/Desa (BKM) oleh KAP	1	5	1	28	12	1	1				1				2		4	44	100
Pelaksanaan Sosialisasi Awal (Kel/Desa, Kab/Kota dan Provinsi)				3	1		5			1							2	86	98
Penetapan Pagu Alokasi BDI		1		10	2	11	1	2		1	6	3		1	12	4	16	19	89
Grand Total	2	15	3	60	17	29	17	15	1	3	20	9	1	4	53	15	76	171	511

6. Pengaduan Berdasarkan Media Penyampaian

Untuk mempermudah dalam menyampaikan pengaduan, setidaknya telah disediakan tigabelas media untuk mengadu, media tersebut terdiri atas: Tatap Langsung, Buku Pengaduan, Kotak Pengaduan, Telepon, SMS, Faksimil, Surat, Email, Pengaduan On-Line, Kunjungan Lapangan/Supervisi, Facebook, Twitter, dan Instagram.

Berdasarkan data pada bulan Februari 2018 pengaduan yang paling banyak menggunakan media penyampaian pengaduan berupa tatap langsung/muka dengan 5 (lima) tema dominan pengaduan sejumlah 512 pengaduan dan tema lainnya sejumlah 479 pengaduan (total 991 pengaduan).



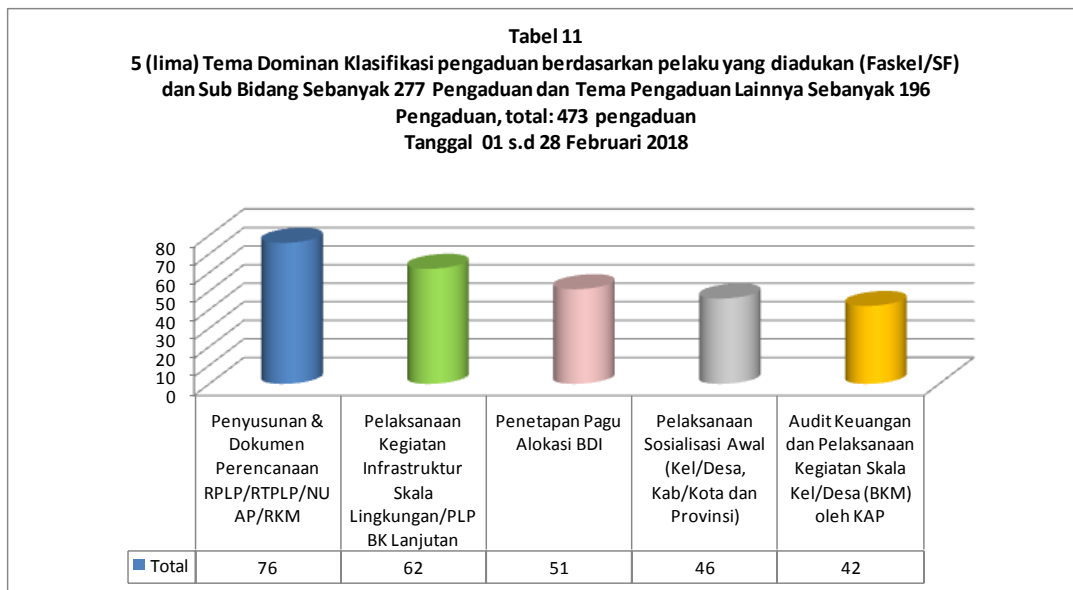
Tabel 10a di bawah berdasarkan per provinsi.

MEDIADUAN/SUB BIDANG/PROVINSI/PROGRAM KOTAKU (NSUP) WILAYAH 2	Tabel 10A																	
	BALI	D.I. YOGYAKARTA	GORONTALO	JAWA TENGAH	JAWA TIMUR	KALIMANTAN	KALIMANTAN SELATAN	KALIMANTAN TENGAH	KALIMANTAN UTARA	MALUKU	MALUKU UTARA	NUSA TENGGARA BARAT	NUSA TENGGARA TIMUR	SULAWESI BARAT	SULAWESI SELATAN	SULAWESI TENGAH	SULAWESI UTARA	Grand Total
Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Skala Lingkungan/PLPB Lanjutan	1	9	2	1		15	13	9	1	2	9	3	17	7	9	13	111	
Penyusunan & Dokumen Perencanaan RPLP/RTPLP/NUAP/RKM				17	2	1					4	5	22	4	45	10	110	
Audit Keuangan dan Pelaksanaan Kegiatan Skala Kel/Desa (BKM) oleh KAP	1	5	1	28	13	1		1				1		2		44	101	
Pelaksanaan Sosialisasi Awal (Kel/Desa, Kab/Kota dan Provinsi)				3		1		5			1						87	99
Penetapan Pagu Alokasi BDI		1		11	3	11	1	1		1	7	3	1	12	4	16	19	91
Grand Total	2	15	3	60	18	29	14	16	1	3	21	9	4	53	15	76	173	512

7. Pengaduan Berdasarkan Pelaku Yang Diadukan

Untuk mengetahui pelaku yang diadukan terdapat 9 pilihan terdiri atas: KSM, BKM/LKM, Aparat Kelurahan/Kecamatan, Aparat Kabupaten/Kota/Provinsi, Faskel/SF, Korkot, KMW/OC/OSP, KMP/Proyek, dan Kontraktor/Jasa Konsultan.

Berdasarkan data pada bulan Februari 2017 pengaduan yang paling banyak berdasarkan pelaku yang diadukan adalah Fasilitator Kelurahan/Senior Fasilitator (Faskel/SF) dengan 5 (lima) tema dominan pengaduan sejumlah 277 pengaduan dan tema lainnya sejumlah 196 pengaduan (total 473 pengaduan).



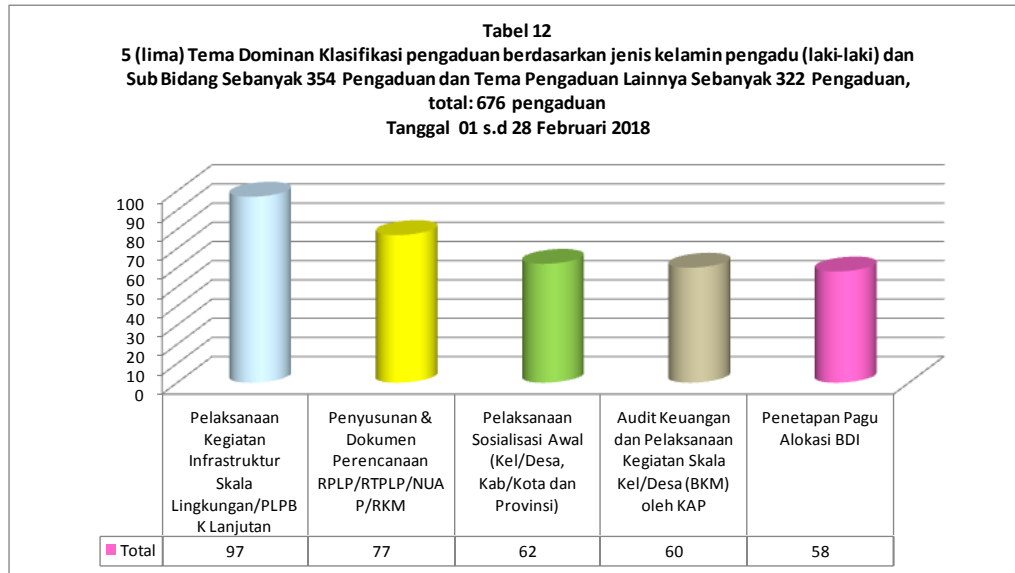
Tabel 11a di bawah berdasarkan per provinsi.

PELAKU YANG DIADUKAN/SUB BIDANG/PROVINSI/PROGRAM KOTAKU (NSUP) WILAYAH 2	D I Y O G Y A K A R T A													Grand Total
	J A W A T E N G A H	J A W A T I M U R	K A L I M A N T A N	K A L I M A N T A N	K A L I M A N T A N	M A L U K U	M A L U K U	N U S A T E N G G A R A	N U S A T E N G G A R A	S U L A W E S I	S U L A W E S I	S U L A W E S I	S U L A W E S I	
Penyusunan & Dokumen Perencanaan RPLP/RTPLP/NUAP/RKM		11	1	1				2		19	3	36	3	76
Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Skala Lingkungan/PLPBK Lanjutan	1	2	1	10	4		1	2	6	17	3	4	11	62
Penetapan Pagu Alokasi BDI		8	1	11				1	3	1	12	4	6	51
Pelaksanaan Sosialisasi Awal (Kel/Desa, Kab/Kota dan Provinsi)		3				5								46
Audit Keuangan dan Pelaksanaan Kegiatan Skala Kel/Desa (BKM) oleh KAP		10	2							2		3	25	42
Grand Total	1	34	5	22	4	5	1	3	11	1	50	10	49	277

8. Pengaduan Berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk pengaduan berdasarkan jenis kelamin terdapat 3 pilihan terdiri atas: Laki-laki, Perempuan, dan Tidak diketahui.

Berdasarkan data pada bulan Februari 2018 pengaduan berdasarkan jenis kelamin pengadu adalah Laki-laki dengan 5 (lima) tema dominan pengaduan sejumlah 354 pengaduan dan tema lainnya sejumlah 322 pengaduan (total 676 pengaduan).



Tabel 12a di bawah berdasarkan per provinsi.

Tabel 12A

JENIS KELAMIN PENGADU/SUB BIDANG/PROVINSI/PROGRAM KOTAKU WILAYAH 2	BAL	DI	JAWA BARU	JAWA TENGAH	JAWA TIMUR	KALIMANTAN SELATAN	KALIMANTAN TENGAH	KALIMANTAN UTARA	MALUKU	MALUKU UTARA	NUSA TENGGARA BARAT	NUSA TENGGARA TIMUR	PAPUA	SULAWESI BARAT	SULAWESI SELATAN	SULAWESI TENGAH	SULAWESI UTARA	Grand Total		
Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Skala Lingkungan/PLPB Lanjutan	1	9	1	1	1	10	16	7	1	2	8		1	2	16	6	6	9	97	
Penyusunan & Dokumen Perencanaan RPLP/RTPLP/NUAP/RKM				13	2						2	4			20	4	29	3	77	
Pelaksanaan Sosialisasi Awal (Kel/Desa, Kab/Kota dan Provinsi)				2	1		4			1							2	52	62	
Audit Keuangan dan Pelaksanaan Kegiatan Skala Kel/Desa (BKM) oleh KAP	1	3	21	6	1					1					1	7	2	24	60	
Penetapan Pagu Alokasi BDI				11	1	6	1	1		1	6	2				7	2	9	10	58
Grand Total	2	12	1	48	10	18	17	12	1	3	17	7	1	2	44	12	48	98	1	354

Penutup

Dalam laporan bulan Februari 2018 ini dapat disampaikan bahwa Program KOTAKU (Program Kota Tanpa Kumuh) wilayah 2 (dua) berjumlah 1.009 pengaduan (selesai 1.006 (99,7%), proses 3 (0,1%) pengaduan), sedangkan dalam pelaksanaan kegiatan program KOTAKU pencegahan & peningkatan kumuh tingkat kota pengaduannya didominasi oleh Provinsi Sulawesi Utara (274 pengaduan) dan Provinsi Jawa Tengah (136 pengaduan) dan Sulawesi Tenggara (116 pengaduan).

Adapun untuk pengaduan dalam pelaksanaan kegiatan program KOTAKU pencegahan dan peningkatan kumuh tingkat Kelurahan/Desa yang paling banyak diadakan adalah mengenai Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Skala Lingkungan/PLPBK Lanjutan (120 pengaduan atau 20%) sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan pencegahan dan peningkatan kumuh tingkat Kabupaten/Kota yang paling banyak diadakan adalah mengenai pelaksanaan sosialisasi awal (Kel/Desa, Kab/Kota, dan Provinsi) (99 pengaduan atau 30,18%), dan untuk lokasi bekas dampungan PNPM Mandiri Perkotaan yang banyak diadakan adalah pelaksanaan kegiatan pemilu BKM (PNPM Mandiri Perkotaan) (30 pengaduan atau 36,5%).

Pada laporan PIM ini belum seluruh Provinsi mengirimkan data pengaduannya. Untuk kenyamanan penginputan data, PIM Pusat berusaha untuk memperbaiki format isian manual PIM agar menjadi lebih mudah dan diupayakan SIM PIM On-Line berbasis website dapat segera dioperasionalkan.